LAPORAN
ANALISIS KEBUTUHAN SARANA DAN PRASARANA
PUKIMAN PADAT KECAMATAN SABBANG
KABUPATEN LUWU UTARA

DISUSUN OLEH:
KELOMPOK IV

MUH. SIGIT SETIAWAN S.	20.023.22.201.146
SULKIFLI	20.023.22.201.159
NOVAL PERMANA	20.023.22.201.163
TIARA NURPALAQ	20.023.22.201.150

FAKULTAS TEKNIK JURUSAN SIPIL
UNIVERSITAS ANDI DJEMMA
2022

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Swt., yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga penyusun dapat membuat laporan Perencanaan Wilayah Kota (PWK) ini.

Walaupun demikian, penyusun berusaha dengan semaksimal mungkin demi kesempurnaan penyusunan laporan ini. Saran dan kritik yang sifatnya membangun begitu diharapkan oleh penyusun demi kesempurnaan dalam penulisan laporan berikutnya.

Akhir kata, penyusun berharap laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membantu, semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan kalian. Amin.

Palopo, 14 januari 2022

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Maksud dan Tujuan	2
BAB II LANDASAN TEORI	3
2.1 Tinjauan Umum.....	3
2.2 Standar Sarana dan Prasarana Wilayah	4
BAB III PEMBAHASAN	15
3.1 Gambaran Umum Wilayah.....	15
3.2 Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir.....	16
3.3 Jumlah Fasilitas Pendidikan, Ekonomi dan Kesehatan	16
3.4 Proyeksi Penduduk 20 Tahun yang akan datang	17
3.5 Kebutuhan Sarana dan Prasarana 20 tahun yang akan datang	17
BAB IV PENUTUP.....	22
4.1 Kesimpulan.....	22
4.2 Saran	22
DAFTAR PUSTAKA	23

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Kebutuhan Program Ruang Minimum	7
Tabel 2.2	Kebutuhan Sarana Pendidikan Dan Pembelajaran	8
Tabel 2.3	Pembakuan Tipe SD/MI, SLTP/Mts &SMU	8
Tabel 2.4	Kebutuhan ruang belajar pada SD/MI, SLTP/MTs & SMU	9
Tabel 2.5	Kebutuhan Luas Lantai dan Lahan Sarana Pendidikan Menurut Tipe Sekolah	9
Tabel 2.6	Jenis Sarana Perdagangan dan Niaga	12
Tabel 2.7	Kebutuhan Sarana Kesehatan	14
Tabel 3.1	Jumlah Penduduk 5 Tahun Terakhir	16
Tabel 3.2	Jumlah Fasilitas Pendidikan	16
Tabel 3.3	Jumlah Fasilitas Ekonomi	16
Tabel 3.4	Jumlah Fasilitas Kesehatan	16
Tabel 3.5	Proyeksi Penduduk 20 Tahun yang Akan Datang	17
Tabel 3.6	Kebutuhan Sarana Pendidikan ditahun 2024	17
Tabel 3.7	Kebutuhan Sarana Pendidikan ditahun 2029	17
Tabel 3.8	Kebutuhan Sarana Pendidikan ditahun 2034	18
Tabel 3.9	Kebutuhan Sarana Pendidikan ditahun 2039	18
Tabel 3.10	Kebutuhan Sarana Ekonomi ditahun 2024	18
Tabel 3.11	Kebutuhan Sarana Ekonomi ditahun 2029	19
Tabel 3.12	Kebutuhan Sarana Ekonomi ditahun 2034	19
Tabel 3.13	Kebutuhan Sarana Ekonomi ditahun 2039	19
Tabel 3.14	Kebutuhan Sarana Kesehatan ditahun 2024	20
Tabel 3.15	Kebutuhan Sarana Kesehatan ditahun 2029	20
Tabel 3.16	Kebutuhan Sarana Kesehatan ditahun 2034	20
Tabel 3.17	Kebutuhan Sarana Kesehatan ditahun 2039	21

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Sketsa Peta Kecamatan Sabbang	15
-------------------	--	-----------

Abstract

Paper ini membahas bagaimana kebutuhan sarana dan prasarana di kecamatan sabbang kabupaten luwu utara fokus utamanya adalah sarana pendidikan, kesehatan dan perekonomian. paper ini merupakan tugas mata kuliah perencanaan wilayah dan kota

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara geografis Kecamatan Sabbang terletak pada 02°21'46" LS - 20°45'29" LS dan 119°47'35" BT - 120°11'13" BT. Kecamatan Sabbang yang terletak di ujung sebelah barat merupakan pintu gerbang Kabupaten Luwu Utara dari arah Makassar yang memiliki - 3 - luas wilayah sekitar 525,08 km². Pemerintah Kecamatan Sabbang membawahi 1 (satu) Kelurahan dan 19 (sembilan belas) Desa. Desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Malimbu (114,86 km²) atau meliputi 21,87 persen luas wilayah Kecamatan Sabbang dan desa yang paling kecil wilayahnya adalah Desa Batu Alang (4,11 km²) atau sebesar 0,78 persen. Jarak tempuh dari kantor camat Sabbang ke ibukota kabupaten ± 15 km dengan jarak tempuh ± 20 menit.

Dengan luas wilayah 525,08 km² dan jumlah penduduk sebanyak 39.637 jiwa, maka tingkat kepadatan penduduk di kecamatan sabbang sebesar 75 jiwa per km². Dengan kata lain setiap kilometer luas wilayah dihuni 76 orang. Pada tahun yang sama, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 19.926 jiwa dan jumlah penduduk perempuan 19.711 jiwa. Dengan demikian maka rasio jenis kelamin adalah sebesar 100 yang artinya dari setiap penduduk perempuan terdapat 100 penduduk laki-laki.

Ditunjang oleh kondisi alamnya yang subur, Kecamatan Sabbang mempunyai potensi yang besar di bidang Pertanian, Perkebunan, Hortikultura, Peternakan, Perikanan, serta Perdagangan. Pengelolaan di beberapa sektor tersebut secara optimal diharapkan dapat meningkatkan pendapatan asli daerah di Kecamatan Sabbang secara umum dan utamanya mendatangkan hasil pendapatan bagi masyarakat.

Potensi unggulan di Kecamatan Sabbang bersumber dari sektor pertanian, perkebunan, dan hortikultura. Pada tahun 2017, produksi padi di Kecamatan Sabbang mencapai 45.851 ton yang dihasilkan dari lahan persawahan seluas $\pm$ 3.527 Ha. Selain itu produktivitas tanaman pangan yang lainnya yakni produksi jagung, ubi kayu dan ubi jalar, kacang hijau, serta kacang

1.2 Maksud dan Tujuan

Dari laporan ini, pembaca di harapkan dapat memahami dengan mudah tentang standar sarana dan prasarana yang terdapat di wilayah Kecamatan Sabbang. Serta dapat menganalisis kebutuhan pengembangan penyediaan prasarana pendidikan, kesehatan dan Ekonomi pada wilayah di Kecamatan Sabbang.

BAB II

LANDASAN TEORI

Sarana dan prasarana merupakan kebutuhan dasar dari area pemukiman (fisu 2018). pemenuhan sarana dan prasarana tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan permukiman, namun juga dapat meningkatkan perekonomian penduduk (fisu 2020).

2.1 Tinjauan Umum

Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan, kawasan, kota atau wilayah (spatial space) sehingga memungkinkan ruang tersebut berfungsi mestinya sebagaimana. Infrastruktur metujuk pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, pengairan, drainase, bangunan-bangunan gedung dan fasilitas publik yang lain yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dalam lingkup sosial dan ekonomi (Grigg, 1988 dalam Kodoatie, 2005:8). Sementara itu adapun pengertian prasarana menurut Jayadinata (1992 dalam Juliawan, 2015:5) prasarana merupakan suatu faktor potensial yang sangat penting dalam menentukan arah dan masa depan perkembangan suatu wilayah, karena pembangunan tidak akan sukses dan berjalannya baik tanpa dukungan prasarana yang memadai, prasarana kota merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota. Dengan demikian prasarana kota merupakan fasilitas umum yang menjadi penunjang utama terselenggaranya suatu proses atau kegiatan dalam kota, yang pada akhirnya akan menentukan perkembangan kota.

Prasarana lingkungan merupakan kelengkapan dasar fisik lingkungan yang memungkinkan lingkungan dapat berfungsi sebagaimana mestinya, lebih jelasnya prasarana lingkungan atau sarana yang utama bagi berfungsinya suatu lingkungan permukiman adalah jaringan jalan untuk mobilitas orang dan angkutan barang, mencegah perambatan kebakaran serta untuk menciptakan ruang dan bangunan yang teratur, jaringan air bersih, jaringan saluran pembuangan air limbah dan tempat pembuangan sampah untuk kesehatan lingkungan, serta jaringan saluran air hujan untuk pematasan (drainase) dan pencegah banjir setempat.

Fungsi prasarana adalah untuk melayani dan mendorong terwujudnya lingkungan permukiman dan lingkungan usaha yang optimal sesuai dengan fungsinya, upaya memperbaiki lingkungan membutuhkan keseimbangan antar tingkat kebutuhan masyarakat (Diwiryono, 1996 dalam Juliawan, 2015:6) 22.

Dari pengertian tersebut dapat disederhanakan bahwa prasarana merupakan kerangka dasar dari suatu sistem, kerangka dasar tersebut menjadi fasilitas umum dan pelengkapan dasar fisik yang memungkinkan lingkungan untuk berfungsi sebagaimana mestinya, serta menjadi penentu keberhasilan dari suatu perkembangan kota.

Sebagai salah satu konsep pola pikir di bawah ini diilustrasikan diagram sederhana bagaimana peran infrastruktur. Diagram ini menunjukkan bahwa secara ideal lingkungan alam merupakan pendukung dari sistem infrastruktur, dan sistem ekonomi didukung oleh sistem infrastruktur. Sistem sosial sebagai obyek dan sasaran didukung oleh sistem ekonomi.

2.2 Standar Sarana dan Prasarana Wilayah

Standar Nasional Indonesia (SNI 03-1733-2004) yang dikeluarkan oleh BSN tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan ini disusun oleh Panitia Teknik Konstruksi dan Bangunan. Standar ini memuat uraian detail prinsip-prinsip perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan, yang disusun sebagai revisi dari SNI 03-1733-1989 tentang Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan.

Standar ini disusun melalui konsensus di Bandung pada tanggal 17 Juni 2003, yang dihadiri oleh stakeholder terkait. Apabila dalam penerapan standar ini terdapat hal-hal yang meragukan, diharapkan dapat membandingkan secara langsung dengan substansi yang terdapat dalam acuan tersebut, atau dengan edisi yang terakhir, kecuali hal-hal yang disesuaikan dengan kondisi Indonesia.

Standar Nasional Indonesia Tata cara perencanaan lingkungan perumahan di perkotaan adalah panduan (dokumen nasional) yang berfungsi sebagai kerangka acuan untuk perencanaan, perancangan, penaksiran biaya dan kebutuhan ruang, serta pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman.

2.2.1 Sarana Pendidikan dan Pembelajaran

1) Deskripsi Umum

Dasar penyediaan sarana pendidikan adalah untuk melayani setiap unit administrasi pemerintahan baik yang informal (RT,RW) maupun yang formal (Kelurahan, Kecamatan), dan bukan didasarkan semata-mata pada jumlah penduduk yang akan dilayani oleh sarana tersebut. Dasar penyediaan sarana pendidikan ini juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

Perencanaan sarana pendidikan harus didasarkan pada tujuan pendidikan yang akan dicapai, dimana sarana pendidikan dan pembelajaran ini akan menyediakan ruang belajar harus memungkinkan siswa untuk dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, serta sikap secara optimal.

2) Jenis Sarana

Sarana pendidikan yang diuraikan dalam standar ini hanya menyangkut bidang pendidikan yang bersifat formal / umum, yaitu meliputi tingkat prabelajar (Taman Kanak-kanak); tingkat dasar (SD/MI); tingkat menengah (SLTP/MTs dan SMU).SNI 03-1733-2004 25 dari 52.

Adapun penggolongan jenis sarana pendidikan dan pembelajaran ini meliputi:

- a) taman kanak-kanak (TK), yang merupakan penyelenggaraan kegiatan belajar dan mengajar pada tingkatan pra belajar dengan lebih menekankan pada kegiatan bermain, yaitu 75%, selebihnya bersifat pengenalan;
- b) sekolah dasar (SD), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program enam tahun;
- c) sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP), yang merupakan bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program tiga tahun sesudah sekolah dasar (SD);
- d) sekolah menengah umum (SMU), yang merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan menengah mengutamakan perluasan pengetahuan dan peningkatan keterampilan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi;
- e) sarana pembelajaran lain yang dapat berupa taman bacaan ataupun perpustakaan umum lingkungan, yang dibutuhkan di suatu lingkungan perumahan sebagai sarana untuk meningkatkan minat membaca, menambah ilmu pengetahuan, rekreasi serta sarana penunjang pendidikan.

3) Kebutuhan Ruang dan Lahan

Berbagai pertimbangan yang harus diperhatikan pada penentuan kebutuhan ruang dan lahan adalah:

- a) Penyediaan jumlah sarana pendidikan dan pembelajaran yang harus disediakan didasarkan pada Tabel 9.
- b) Kebutuhan sarana pendidikan prabelajar serta pendidikan tingkat dasar dan menengah, harus direncanakan berdasarkan perhitungan proyeksi jumlah siswa.

- c) Perencanaan kebutuhan ruang dan lahan untuk sarana pendidikan didasarkan tipe masing-masing sekolah yang dibedakan menurut:
- 1) jumlah rombongan belajar;
 - 2) jumlah peserta didik;
 - 3) jumlah tenaga kependidikan; kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dan tenaga tata usaha;
 - 4) kebutuhan ruang belajar, ruang kantor, dan ruang penunjang;
 - 5) luas tanah, dan lingkungan/lokasi sekolah.
- d) Kebutuhan luas lantai dan lahan untuk masing-masing sarana pendidikan tergantung pada tipe sekolah untuk masing-masing tingkatan pendidikan. Untuk perencanaan bangunan SMU, mengacu pada SNI-03-1730-2002 tentang Tata cara perencanaan bangunan gedung sekolah menengah umum. Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada beserta posisi pusat lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan / blok yang nantinya lahir sesuai konteks lingkungannya.

Tabel 2.1 Kebutuhan program ruang minimum

No.	Jenis Sarana	Program Ruang
1.	Taman Kanak-kanak	Memiliki minimum 2 ruang kelas @ 25-30 murid. Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka/bermain $\pm 700 \text{ m}^2$
2.	Sekolah Dasar	Memiliki minimum 6 ruang kelas @ 40 murid Dilengkapi dengan ruang-ruang lain dan ruang terbuka / bermain $\pm 3000-7000 \text{ m}^2$
3.	SLTP	
4.	SMU	
5.	Taman Bacaan	Memiliki minimum 1 ruang baca @ 15 murid

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

Tabel 2.2 Kebutuhan sarana pendidikan dan pembelajaran

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Taman Kanak-kanak	1.250	216 termasuk rumah penjaga 36 m ²	500	0,28 m ² /j	500 m'	Di tengah kelompok warga. Tidak menyeberang jalan raya. Bergabung dengan taman sehingga terjadi pengelompokan kegiatan.	2 rombongan prabelajar @ 60 murid dapat bersatu dengan sarana lain
2.	Sekolah Dasar	1.600	633	2.000	1,25	1.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum. Disatukan dengan lapangan olah raga. Tidak selalu harus di pusat lingkungan.	Kebutuhan harus berdasarkan perhitungan dengan rumus 2, 3 dan 4. Dapat digabung dengan sarana pendidikan lain, mis. SD, SMP, SMA dalam satu kompleks
3.	SLTP	4.800	2.282	9.000	1,88	1.000 m'		
4.	SMU	4.800	3.835	12.500	2,6	3.000 m'		
5.	Taman Bacaan	2.500	72	150	0,09	1.000 m'	Di tengah kelompok warga tidak menyeberang jalan lingkungan.	

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

Tabel 2.3 Pembakuan tipe SD/MI, SLTP/MTs dan SMU

Tingkat Pendidikan	Tipe Sekolah	Rombongan Belajar	Peserta Didik (siswa)	Lokasi
SD/MI	Tipe A	12	480	Dekat dengan lokasi ruang terbuka lingkungan
	Tipe B	9	360	
	Tipe C	6	240	
SLTP/MTs	Tipe A	27	1.080	
	Tipe B	18	720	
	Tipe C	9	360	
SMU	Tipe A	27	1.080	
	Tipe B	18	720	
	Tipe C	9	360	

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

Tabel 2.4 Kebutuhan ruang belajar pada SD/MI, SLTP/MTs & SMU

Kebutuhan ruang belajar			
Rumus 1 Tingkat pra belajar	Rumus 2 Tingkat SD/MI (berdasarkan sistem pendidikan SD 6 tahun)	Rumus 3 Tingkat SLTP/MTs (berdasarkan sistem pendidikan SLTP/MTs)	Rumus 4 Tingkat SMU (berdasarkan sistem pendidikan SMU)
$S = \frac{(UP5 - U_s) \times a\%}{E}$ <p>Keterangan : S kebutuhan jumlah ruang belajar tingkat pra sekolah; UP5 hasil proyeksi anak usia pra sekolah selama 5 tahun; Us jumlah anak usia pra sekolah yang sudah tertampung; a% anak usia pra sekolah yang ingin masuk pendidikan pra sekolah; E daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi lingkungan 35–40 siswa.</p>	$S_{SD} = \frac{(D_{P5} - D_s) \times d\%}{E}$ <p>Keterangan : S_{sd} kebutuhan jumlah ruang belajar tingkat SD/MI; D_{p5} hasil proyeksi anak usia SD/MI selama 5 tahun; Ds jumlah anak usia tingkat SD/MI yang sudah tertampung; d% presentase jumlah anak tingkat SD/MI yang perlu memasuki lembaga pendidikan tingkat SD/MI; E daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi lingkungan 40 siswa.</p>	$S_{SLTP} = \frac{(L_{SD5} - L_{SDS}) \times p\%}{E}$ <p>Keterangan : S_{SLTP} kebutuhan ruang belajar tingkat SLTP; L_{SD5} proyeksi lulusan SD selama 5 tahun; L_{SDS} jumlah lulusan SD yang dapat ditampung; p% presentase lulusan SD yang melanjutkan ke SLTP; E daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi lingkungan 40 siswa.</p>	$S_{SLTA} = \frac{(L_{SLTP5} - L_{SLTPS}) \times a\%}{E}$ <p>Keterangan : S_{SLTA} kebutuhan ruang belajar tingkat SLTA; L_{SLTP5} proyeksi lulusan SLTP selama 5 tahun sesuai data dan instansi yang berwenang; L_{SLTPS} jumlah lulusan SLTP yang dapat ditampung; a% presentase lulusan SLTP yang melanjutkan ke SLTA; E daya tampung paling efektif dan efisien berdasarkan kondisi lingkungan 40 siswa.</p>

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

Tabel 2.5 Kebutuhan luas lantai dan lahan sarana pendidikan menurut tipe sekolah

Tingkat Pendidikan	Tipe Sekolah	Rombongan Belajar (rombongan)	Peserta Didik (siswa)	Luas Ruang Minimum (m ²)	Luas Lahan Minimum (m ²)
SD/MI	Tipe A	12	480	1.000	3.000
	Tipe B	9	360	633	2.000
	Tipe C	6	240	251	1.000
SLTP/MTs	Tipe A	27	1.080	3.077	9.000
	Tipe B	18	720	2.282	9.000
	Tipe C	9	360	1.502	6.000
SMU	Tipe A	27	1.080	5.233	1 lantai: 15.000
					2 lantai: 9.500
					3 lantai: 7.000
	Tipe B	18	720	3.835	1 lantai: 12.500
					2 lantai: 8.000
					3 lantai: 5.000
	Tipe C	9	360	2.692	10.000

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

2.2.2 Sarana Perdagangan dan Niaga

1) Deskripsi Umum

Sarana perdagangan dan niaga ini tidak selalu berdiri sendiri dan terpisah dengan bangunan sarana yang lain. Dasar penyediaan selain berdasarkan jumlah penduduk yang akan dilayaninya, juga mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan / blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

2) Jenis Sarana

Kebutuhan ruang dan lahan untuk sarana ini akan berkaitan juga dengan daya dukung lingkungan dan jalan yang ada di sekitar bangunan sarana tersebut. Besaran kebutuhan ruang dan lahan menurut penggolongan jenis sarana perdagangan dan niaga adalah:

- a) warung / toko Luas lantai yang dibutuhkan $\pm 50 \text{ m}^2$ termasuk gudang kecil. Apabila merupakan bangunan tersendiri (tidak bersatu dengan rumah tinggal), luas tanah yang dibutuhkan adalah 100 m^2 .
- b) pertokoan (skala pelayanan untuk 6.000 penduduk) Luas lantai yang dibutuhkan 1.200 m^2 . Sedangkan luas tanah yang dibutuhkan 3.000 m^2 . Bangunan pertokoan ini harus dilengkapi dengan:
 - 1) tempat parkir kendaraan umum yang dapat dipakai bersama kegiatan lain pada pusat lingkungan;
 - 2) sarana-sarana lain yang erat kaitannya dengan kegiatan warga;

- 3) pos keamanan.
- c) pusat pertokoan dan atau pasar lingkungan (skala pelayanan unit kelurahan ≈ 30.000 penduduk) Luas tanah yang dibutuhkan: 10.000 m^2 . Bangunan pusat pertokoan / pasar lingkungan ini harus dilengkapi dengan:
- 1) tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
 - 2) terminal kecil atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
 - 3) pos keamanan;
 - 4) sistem pemadam kebakaran;
 - 5) musholla/tempat ibadah.
- d) pusat perbelanjaan dan niaga (skala pelayanan unit kelurahan ≈ 120.000 penduduk) Luas tanah yang dibutuhkan adalah 36.000 m^2 . Bangunan pusat perbelanjaan harus dilengkapi:
- 1) tempat parkir umum, sudah termasuk kebutuhan luas tanah;
 - 2) terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan;
 - 3) pos keamanan;
 - 4) sistem pemadam kebakaran;
 - 5) musholla/tempat ibadah.

Tabel 2.6 Jenis sarana perdagangan dan niaga

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria	
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian
1.	Toko / Warung	250	50 (termasuk gudang)	100 (bila berdiri sendiri)	0,4	300 m'	Di tengah kelompok tetangga. Dapat merupakan bagian dari sarana lain
2.	Pertokoan	6.000	1.200	3.000	0,5	2.000 m'	Di pusat kegiatan sub lingkungan. KDB 40% Dapat berbentuk P&D
3.	Pusat Pertokoan + Pasar Lingkungan	30.000	13.500	10.000	0,33		Dapat dijangkau dengan kendaraan umum
4.	Pusat Perbelanjaan dan Niaga (toko + pasar + bank + kantor)	120.000	36.000	36.000	0,3		Terletak di jalan utama. Termasuk sarana parkir sesuai ketentuan setempat

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

2.2.3 Sarana Kesehatan

1) Deskripsi Umum

Sarana kesehatan berfungsi memberikan pelayanan kesehatan kesehatan kepada masyarakat, memiliki peran yang sangat strategis dalam mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat sekaligus untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk. Dasar penyediaan sarana ini adalah didasarkan jumlah penduduk yang dilayani oleh sarana tersebut.

Dasar penyediaan ini juga akan mempertimbangkan pendekatan desain keruangan unit-unit atau kelompok lingkungan yang ada. Tentunya hal ini dapat terkait dengan bentukan grup bangunan/blok yang nantinya terbentuk sesuai konteks lingkungannya. Sedangkan penempatan penyediaan fasilitas ini akan mempertimbangkan jangkauan radius area layanan terkait dengan kebutuhan dasar sarana yang harus dipenuhi untuk melayani pada area tertentu.

2) Jenis Sarana

Beberapa jenis sarana yang dibutuhkan adalah:

- a) posyandu yang berfungsi memberikan pelayanan kesehatan untuk anak-anak usia balita;
- b) balai pengobatan warga yang berfungsi memberikan pelayanan kepada penduduk dalam bidang kesehatan dengan titik berat terletak pada penyembuhan (curative) tanpa perawatan, berobat dan pada waktu-waktu tertentu juga untuk vaksinasi;
- c) balai kesejahteraan ibu dan anak (BKIA) / Klinik Bersalin), yang berfungsi melayani ibu baik sebelum, pada saat dan sesudah melahirkan serta melayani anak usia sampai dengan 6 tahun;
- d) puskesmas dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai sarana pelayanan kesehatan tingkat pertama yang memberikan pelayanan kepada penduduk dalam penyembuhan penyakit, selain melaksanakan program pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit di wilayah kerjanya;
- e) puskesmas pembantu dan balai pengobatan, yang berfungsi sebagai unit pelayanan kesehatan sederhana yang memberikan pelayanan kesehatan terbatas dan membantu pelaksanaan kegiatan puskesmas dalam lingkup wilayah yang lebih kecil;
- f) tempat praktek dokter, merupakan salah satu sarana yang memberikan pelayanan kesehatan secara individual dan lebih dititikberatkan pada usaha penyembuhan tanpa perawatan; dan
- g) apotik, berfungsi untuk melayani penduduk dalam pengadaan obat-obatan, baik untuk penyembuhan maupun pencegahan.

Tabel 2.7 Kebutuhan sarana kesehatan

No.	Jenis Sarana	Jumlah Penduduk pendukung (jiwa)	Kebutuhan Per Satuan Sarana		Standard (m ² /jiwa)	Kriteria		Keterangan
			Luas Lantai Min. (m ²)	Luas Lahan Min. (m ²)		Radius pencapaian	Lokasi dan Penyelesaian	
1.	Posyandu	1.250	36	60	0,048	500	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dengan balai warga atau sarana hunian/rumah
2.	Balai Pengobatan Warga	2.500	150	300	0,12	1.000 m'	Di tengah kelompok tetangga tidak menyeberang jalan raya.	Dapat bergabung dalam lokasi balai warga
3.	BKIA / Klinik Bersalin	30.000	1.500	3.000	0,1	4.000 m'	Dapat dijangkau dengan kendaraan umum	
4.	Puskesmas Pembantu dan Balai Pengobatan Lingkungan	30.000	150	300	0,006	1.500 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kelurahan
5.	Puskesmas dan Balai Pengobatan	120.000	420	1.000	0,008	3.000 m'	-idem-	Dapat bergabung dalam lokasi kantor kecamatan
6.	Tempat Praktek Dokter	5.000	18	-	-	1.500 m'	-idem-	Dapat bersatu dengan rumah tinggal/tempat usaha/apotik
7.	Apotik / Rumah Obat	30.000	120	250	0,025	1.500 m'	-idem-	

CATATAN Acuan diambil dari SNI 03-1733-1989, Tata cara perencanaan kawasan perumahan kota.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Gambaran Umum Wilayah (Kecamatan Sabbang)

Kecamatan Sabbang merupakan kecamatan di kabupaten Luwu Utara yang memiliki luas wilayah sekitar 424,11 Km². Kecamatan Sabbang berbatasan langsung dengan Kabupaten Luwu dan Kecamatan Sabbang Selatan di sebelah selatan. Di sebelah Utara kecamatan Sabbang berbatasan dengan Kecamatan Masamba dan Kecamatan Seko, sedangkan di timur berbatasan dengan kecamatan Baebunta dan kecamatan Masamba, serta di Barat berbatasan dengan Kecamatan Rongkong. Pemerintah Kecamatan Sabbang membawahi 9 desa dan 1 kelurahan dimana seluruh desa sudah berstatus definitif. Desa yang paling luas wilayahnya adalah Desa Malimbu (114,86 Km²) atau meliputi 27,08 persen luas wilayah Kecamatan Sabbang. Adapun desa yang paling kecil wilayahnya adalah Desa Pengkendekan (7,58 Km²) atau 1,79 persen dari total luas kecamatan.

Gambar 3.1 Sketsa Peta Kecamatan Sabbang

3.2 Jumlah penduduk 5 tahun terakhir

Tabel 3.1 Jumlah penduduk 5 tahun terakhir

NO	KECAMATAN	2015	2016	2017	2018	2019
1	SABBANG	37,384	37,855	38,319	38,765	39,335

3.3 Jumlah fasilitas pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

3.3.1 Fasilitas pendidikan

Tabel 3.2 Jumlah fasilitas pendidikan

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	TK	10
2	SD	14
3	SMP/MTS	5
4	SMA/SMK/MA	2

3.3.2 Fasilitas ekonomi

Tabel 3.3 Jumlah fasilitas ekonomi

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	WARUNG MAKAN	66
2	TOKO/KIOS	120
3	PASAR	1

3.3.3 Fasilitas kesehatan

Tabel 3.4 Jumlah fasilitas kesehatan

NO	JENIS FASILITAS	JUMLAH
1	PUSKESMAS	1
2	PUSTU	4
3	POSYANDU	19

3.4 Proyeksi penduduk 20 tahun yang akan datang (2024, 2029, 2034, 2039)

Tabel 3.5 Proyeksi penduduk 20 tahun yang akan datang

NO	KECAMATAN	RASIO	2024	2029	2034	2039
1	SABBANG	0,015	42,227	45,119	48,011	50,903

3.5 Kebutuhan sarana dan prasarana 20 tahun yang akan datang (2024, 2029, 2034, 2039)

3.5.1 Sarana Pendidikan

1) Tahun 2024

Tabel 3.6 Kebutuhan sarana pendidikan ditahun 2024

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2024	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	TK	10	42,227	1.250	34	24
2	SD	14		1.600	26	12
3	SMP/MTS	5		4.800	9	4
4	SMA/SMK/MA	2		4.800	9	7

2) Tahun 2029

Tabel 3.7 Kebutuhan sarana pendidikan ditahun 2029

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2029	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	TK	10	45,119	1250	36	26
2	SD	14		1600	28	14
3	SMP/MTS	5		4800	9	4
4	SMA/SMK/MA	2		4800	9	7

3) Tahun 2034

Tabel 3.8 Kebutuhan sarana pendidikan ditahun 2034

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2034	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	TK	10	48,011	1250	38	28
2	SD	14		1600	30	16
3	SMP/MTS	5		4800	10	5
4	SMA/SMK/MA	2		4800	10	8

4) Tahun 2039

Tabel 3.9 Kebutuhan sarana pendidikan ditahun 2039

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2039	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	TK	10	50,903	1250	41	31
2	SD	14		1600	32	18
3	SMP/MTS	5		4800	11	6
4	SMA/SMK/MA	2		4800	11	9

3.5.2 Sarana ekonomi

1) Tahun 2024

Tabel 3.10 Kebutuhan sarana ekonomi ditahun 2024

NO	SARANA EKONOMI	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2024	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	WARUNG MAKAN	66	42,227	250	169	103
2	TOKO/KIOS	120		6000	7	113
3	PASAR	1		30000	1	1

2) Tahun 2029

Tabel 3.11 Kebutuhan sarana ekonomi ditahun 2029

NO	SARANA EKONOMI	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2029	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	WARUNG MAKAN	66	45,119	250	180	14
2	TOKO/KIOS	120		6000	7	0
3	PASAR	1		30000	1	1

3) Tahun 2034

Tabel 3.12 Kebutuhan sarana ekonomi ditahun 2034

NO	SARANA EKONOMI	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2034	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	WARUNG MAKAN	66	48,011	250	192	126
2	TOKO/KIOS	120		6000	8	0
3	PASAR	1		30000	2	1

4) Tahun 2039

Tabel 3.13 Kebutuhan sarana ekonomi ditahun 2039

NO	SARANA EKONOMI	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2039	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	WARUNG MAKAN	66	50,903	250	204	138

2	TOKO/KIOS	120		6000	8	0
3	PASAR	1		30000	2	1

3.5.3 Sarana kesehatan

1) Tahun 2024

Tabel 3.14 Kebutuhan sarana kesehatan ditahun 2024

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2024	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	PUSKESMAS	1	42,227	120000	0	0
2	PUSTU	4		30000	1	0
3	POSYANDU	19		1250	34	15

2) Tahun 2029

Tabel 3.15 Kebutuhan sarana kesehatan ditahun 2029

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2029	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	PUSKESMAS	1	45,119	120000	0	0
2	PUSTU	4		30000	1	0
3	POSYANDU	19		1250	36	17

3) Tahun 2034

Tabel 3.16 Kebutuhan sarana kesehatan ditahun 2034

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH PENDUDUK	KEBUTUHAN BERDASARKAN	PENAMBAHAN
----	------------------	---------------	-----------------	-----------------	-----------------------	------------

			TAHUN 2034	PENDUKUNG	SNI	
1	PUSKESMAS	1	48,011	120000	0	0
2	PUSTU	4		30000	2	0
3	POSYANDU	19		1250	38	19

4) Tahun 2039

Tabel 3.17 Kebutuhan sarana kesehatan ditahun 2039

NO	SARANA KESEHATAN	JUMLAH SARANA	JUMLAH PENDUDUK TAHUN 2039	JUMLAH PENDUDUK PENDUKUNG	KEBUTUHAN BERDASARKAN SNI	PENAMBAHAN
1	PUSKESMAS	1	50,903	120000	0	0
2	PUSTU	4		30000	2	0
3	POSYANDU	19		1250	41	22

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Ketersediaan sarana pendidikan di Kecamatan Sabbang pada saat ini umumnya telah memadai, dan juga terutama untuk sarana perdagangan.

Kebutuhan sarana permukiman di Kecamatan Sabbang untuk 20 tahun kedepan sangat diperlukan. Karena minimnya ketersediaan sarana kesehatan, maka fasilitas kesehatan sangat diperlukan di Kecamatan Sabbang.

4.2 Saran

Pemerintah perlu mengevaluasi sarana kesehatan di Kecamatan Sabbang yang tidak merata antara satu desa dengan desa lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Fisu, A. A. & Didiaryono, D. (2020, April). Economic & Finansial Feasibility Analysis of Tarakan Fishery Industrial Estate Masterplan. In IOP Conference series: Earth and Environmental Science (Vol. 469, No. 1, p. 012002). IOP publishing.

Fisu, A. A., & Marzaman, L. U. (2018). pemetaan partisipatif kampung pesisir kelurahan Tallo kota Makassar. To Maega: jurnal pengabdian Masyarakat, 1(1). 22-28.

[https://luwuutarakab.bps.go.id/publication/2020/09/28/37ec87467b6092229287bdce/kecamatan-sabbang-dalam-angka-](https://luwuutarakab.bps.go.id/publication/2020/09/28/37ec87467b6092229287bdce/kecamatan-sabbang-dalam-angka-2020.html)

2020.html [http://nawasis.org/portal/download/digilib/369-SNI-2004_1733_03. pdf](http://nawasis.org/portal/download/digilib/369-SNI-2004_1733_03.pdf)

<https://sabbang.luwuutarakab.go.id>

<https://luwuutarakab.bps.go.id/publication/2016/09/26/22243e34bf650cf124411aa8/statistik-daerah-sabbang-2016.htm>

<https://luwuutarakab.bps.go.id/indicator/12/66/1/jumlah-penduduk-kabupaten-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-.html>

<http://portal.luwuutarakab.go.id/content/uploads/images/berita/dokumen/3.-Lutra-dalam-Angka-Th.-2018.pdf>

<https://infosekolah.net/sekolah/kecamatan/Sabbang-Selatan/Kabupaten-Luwu-Utara/Provinsi-Sulawesi-Selatan/indonesia/d44d57b551c9b8f256b94f7b910e213ef7f73450>

<https://sabbangselatan.luwuutarakab.go.id>

<https://makassar.tribunnews.com/2019/01/20/tribunwiki-potensi-kecamatan-sabbang-luwu-utara-produksi-padi-43131-ton-kakao-6146-ton>

<https://buangin.wordpress.com/2011/08/11/19>